

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**  
**SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	2
<b>PENDAHULUAN</b>	2
1.1    Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.2    Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.3    Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
<b>BAB II</b>	5
<b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN BKPSDM</b>	5
2.1    Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan BKPSDM	5
2.2    Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan	9
<b>BAB III</b>	11
<b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD</b>	11
3.1.1.    ASSET	11
3.1.2.    KEWAJIBAN	15
3.1.3.    Ekuitas Dana	15
<b>BAB IV</b>	17
<b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD</b>	17
<b>BAB V</b>	19
<b>PENUTUP</b>	19

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
- b. Neraca,
- c. Laporan Operasional (LO), dan
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

### **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, secara sistematis terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
- BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
- BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON  
KEUANGAN SKPD
- BAB V : PENUTUP



**BAB II**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN BKPSDM**

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan BKPSDM

Bab ini disajikan untuk memperoleh gambaran tentang kinerja keuangan BKPSDM dalam merealisasikan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021. Adapun pencapaian target keuangan yang merupakan perbandingan antara target sebagaimana tertuang dalam APBD (Perubahan) Tahun Anggaran 2021 dengan realisasinya, sebagaimana tabel dibawah ini:

No.	Nama Rekening	Anggaran Perubahan	Jumlah Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
<b>A.</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>8.261.051.961</b>	<b>7.752.972.202</b>	<b>508.079.759</b>	<b>93,85</b>
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>8.261.051.961</b>	<b>7.752.972.202</b>	<b>508.079.759</b>	<b>93,85</b>
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>8.255.279.761</b>	<b>7.747.347.802</b>	<b>507.931.959</b>	<b>93,85</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.426.084.676</b>	<b>4.301.052.005</b>	<b>125.032.671</b>	<b>97,18</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.924.311.376</b>	<b>3.844.903.086</b>	<b>79.408.290</b>	<b>97,98</b>
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.924.311.376	3.844.903.086	79.408.290	97,98
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>73.238.200</b>	<b>70.892.500</b>	<b>2.345.700</b>	<b>96,80</b>
2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.944.000	56.000	98,88
2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.069.200	10.016.700	52.500	99,48
2.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.068.000	9.068.000	0	100,0
2.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.476.500	16.502.000	1.974.500	89,31
2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.624.500	30.361.800	262.700	99,14
<b>3</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>279.035.100</b>	<b>259.318.019</b>	<b>19.717.081</b>	<b>92,93</b>
3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.550.000	5.356.900	193.100	96,52
3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000	37.023.959	10.976.041	77,13



3.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	225.485.100	216.937.160	8.547.940	96,21
<b>4</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>149.500.000</b>	<b>125.938.400</b>	<b>23.561.600</b>	<b>84,24</b>
4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.000.000	77.311.400	12.688.600	85,90
4.2	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	2.975.000	25.000	99,17
4.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.500.000	22.905.500	6.594.500	77,65
4.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	19.259.000	741.000	96,30
4.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000	3.487.500	3.512.500	49,82
<b>II.</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>2.325.449.200</b>	<b>1.956.442.684</b>	<b>369.006.516</b>	<b>84,13</b>
<b>1</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>1.848.525.000</b>	<b>1.514.028.933</b>	<b>334.496.067</b>	<b>81,90</b>
1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1.818.806.000	1.489.586.133	329.219.867	81,90
1.2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	11.609.000	10.885.800	723.200	93,77
1.3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	18.110.000	13.557.000	4.553.000	74,86
<b>2</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>371.148.200</b>	<b>341.643.496</b>	<b>29.504.704</b>	<b>92,05</b>
2.1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	23.980.200	23.599.200	381.000	98,41
2.2	Pengelolaan Promosi ASN	347.168.000	318.044.296	29.123.704	91,61
<b>3</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>54.318.500</b>	<b>51.273.255</b>	<b>3.045.245</b>	<b>94,39</b>
3.1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	46.500.000	45.000.000	1.500.000	96,77
3.2	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	7.818.500	6.273.255	1.545.245	80,24
<b>4</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>51.457.500</b>	<b>49.497.000</b>	<b>1.960.500</b>	<b>96,19</b>
4.1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	14.578.000	14.526.900	51.100	99,65
4.2	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10.000.000	8.230.000	1.770.000	82,30
4.3	Pembinaan Disiplin ASN	16.371.000	16.256.600	114.400	99,30
4.4	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10.508.500	10.483.500	25.000	99,76
<b>III.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>1.503.745.885</b>	<b>1.489.853.113</b>	<b>13.892.772</b>	<b>99,08</b>
<b>1</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>95.154.500</b>	<b>92.823.150</b>	<b>2.331.350</b>	<b>97,55</b>



1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	95.154.500	92.823.150	2.331.350	97,55
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.408.591.385	1.397.029.963	11.561.422	99,18
2.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.408.591.385	1.397.029.963	11.561.422	99,18
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.772.200</b>	<b>5.624.400</b>	<b>147.800</b>	<b>97,44</b>
I.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.772.200</b>	<b>5.624.400</b>	<b>147.800</b>	<b>97,44</b>
2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	548.400	548.400	0	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	548.400	548.400	0	100,00
2.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.223.800	5.076.000	147.800	97,17
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.223.800	5.076.000	147.800	97,17
	<b>JUMLAH :</b>	<b>8.261.051.961</b>	<b>7.752.972.202</b>	<b>508.079.759</b>	<b>93,85</b>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan dari Belanja Daerah/ BKPSDM tahun 2021 terealisasi 93,85% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp8.261.051.961,00 sehingga terdapat SILPA sebesar Rp508.079.759,00 atau sebesar 6,15 %.

Adapun realisasi anggaran berdasarkan rincian belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa

Realisasi Belanja Operasi tahun 2021 sebesar Rp7.747.347.802,00 atau 93,85% dari anggaran sejumlah Rp8.255.279.761,00

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1) Belanja Gaji dan Tunjangan (Gaji Pegawai) (TPP)	3.924.311.376,-	3.844.903.086,-	
	2.385.299.343,-	2.334.999.553,-	2.292.879.100,-
	1.539.012.033,-	1.509.903.533,-	1.486.553.399,-



2) Belanja Barang Jasa	4.329.843.385,-	3.901.319.716,-	1.951.069.836,-
Belanja Barang	351.626.100,-	326.858.671,-	
Belanja Jasa	3.538.788.985,-	3.172.615.506,-	
Belanja Pemeliharaan	93.180.800,-	72.812.204,-	
Belanja Perj.Dinas	346.247.500,-	329.033.335,-	
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>8.254.154.761,-</b>	<b>7.746.222.802,-</b>	<b>1.951.609.836,-</b>

Secara rinci Belanja Operasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.844.903.086,00 atau 97,97% dari anggaran sebesar Rp3.924.311.376,00

b. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp326.858.671,00 atau 92,95% dari anggaran sebesar Rp351.626.100,00

c. Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp72.812.204,00 atau 78,14% dari anggaran sebesar Rp93.180.800,00

d. Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp329.033.335,00 atau 95,02% dari anggaran sebesar Rp346.247.500,00

2. Belanja Modal

Belanja Modal terjadi dari Rekening Belanja Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan dari kegiatan/sub kegiatan Belanja administrasi Umum Perangkat Daerah berupa belanja pengadaan banner dan dari rekening Pengadaan Barang Milik Daerah Pendukung Perangkat Daerah dari Kegiatan/Sub Kegiatan Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.

Jumlah anggaran belanja modal tersebut terealisasi sebesar Rp5.624.400,00 terinci:

- Belanja Modal Alat Kantor dan rumah Tangga Rp548.400,00
- Belanja Modal Komputer (Pengadaan asset tetap) Rp5.076.000,00

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.624.400,00 atau 97,43% dari anggaran sebesar Rp5.772.200,00

Uraian	Anggaran	Realisasi	% realisasi
Belanja Modal dari Rekening Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	548.400,-	548.400,-	100 %
Belanja Modal dari Rekening Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.223.800,-	5.076.000,-	97,17 %
<b>Jumlah :</b>	<b>5.772.200,-</b>	<b>5.624.400,-</b>	<b>73,15 %</b>

## 2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan anggaran tidak ada kendala yang berarti, capaian kinerja keuangan yang tidak 100% lebih disebabkan karena efiseinsi yang dilakukan oleh entitas.

Efisiensi dimaksud antara lain disokong dari :

1. Efisiensi untuk belanja pada program Administrasi pelayanan perkantoran
 

Anggaran Belanja pada Program Administrasi pelayanan perkantoran merupakan anggaran yang bersifat penyediaan dana guna tercukupinya kebutuhan rutin pelayanan perkantoran, sehingga penggunaannya direalisasikan menurut kebutuhan yang ada/yang diperlukan.
2. Efisiensi dari beberapa sub kegiatan pada program Kepegawaian Daerah, antara lain dari kegiatan/sub kegiatan:
  - a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN, sisa anggaran sebesar Rp329.219.867,00 merupakan sisa anggaran dari efisiensi rekening belanja kepesertaan peserta SKD/SKB. Jumlah peserta SKD/SKB yang direncanakan 10.407 orang, terealisasi 8,928 orang peserta (SKD = 7.117 dan SKB 1.811 orang) dan efisiensi dari rekening belanja penginapan bagi panitia Kabupaten Temanggung seleksi SKD/SKB.
  - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN, indikator outcome dari sub kegiatan ini adalah: terlaksananya pengambilan sumpah jabatan, terlaksananya seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama, dan terlaksananya pembinaan karir PNS. Sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp29.123.704,00 merupakan efisiensi dari biaya operasional (belanja barang habis pakai, biaya rapat-rapat koordinasi luar daerah, honorarium nara sumber,dll) dari pelaksanaan ke 3 (tiga) indikator kinerja outcome tersebut.
3. Efisiensi dari sub kegiatan pada program Pengembangan sumber daya manusia, antara lain dari kegiatan/sub kegiatan:



- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan, sisa anggaran sebesar Rp11.561.422,00 merupakan efisiensi penggunaan anggaran untuk biaya operasional (biaya umum kegiatan/belanja habis pakai) dan tidak direalisasikannya biaya bantuan transport dan laundry bagi peserta diklatpim karena pembelajaran diklatpim dilaksanakan secara online dengan metode blended learning.

**BAB III**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

**3.1.1. ASSET**

**ASET LANCAR**

1. Kas dan Setara Kas

a. Kas di Bank

Saldo Kas di Bank dalam Bentuk Rekening Giro Bendahara Pengeluaran dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. ---

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD per 31 Desember 2021 sebesar Rp. -

2. Piutang

Pada Tahun Anggaran 2020, SKPD masih mempunyai sisa piutang sebesar Rp.10.000.000,-

Piutang sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut merupakan denda pengunduran diri sebagai CPNS, atas nama Linggar Farahesti beralamat di Pawiyatan Luhur, Semarang.

Penagihan telah dilakukan mulai tahun 2011 s/d 2013 (copy surat tagihan terlampir) dan pada bulan Mei 2015 yang bersangkutan menyatakan tidak sanggup membayar denda dimaksud (surat pernyataan terlampir).

PIUTANG	TAHUN 2020 Rp.	TAHUN 2021 Rp.
Denda pengunduran diri CPNS	10.000.000,-	10.000.000,-

3. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dengan maksud sebagai pendukung operasional SKPD, dengan rincian saldo per 31 Desember 2020 dan per tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut :



<b>Persediaan</b>	<b>2021 Rp.</b>	<b>2020 Rp.</b>
a. ATK	3.866.550,00	8.255.100,00
b. Alat listrik & elektronik	333.000,00	3.044.000,00
c. Perangko, Materai, benda pos	563.000,00	222.000,00
d. Peralatan kebersihan	101.000,00	502.400,00
e. Bahan Baku bangunan	00,00	00,00
f. Pemeliharaan computer (suku cadang)	810.000,00	00,00
g. Barang Cetak	330.000,00	870.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.003.550,00</b>	<b>12.893.500,00</b>

#### ASET TETAP

Komposisi dan Nilai Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 dengan tidak mencantumkan barang ekstrakontabel tersaji sebagai berikut :

<b>Aset Tetap</b>		<b>Saldo 2020 Rp.</b>	<b>Saldo 2021 Rp.</b>
1.	Tanah	0	0
2.	Alat Besar	17.773.000,-	17.773.000,-
3.	Alat Angkut	986.320.773,-	963.294.773,-
4.	Peralatan Pertanian	290.000,-	290.000,-
5.	Alat Kantor dan Alat rumah Tangga	750.177.400,-	750.177.400,-
6.	Alat Studio, Komunikasi, Pemancar	135.535.000,-	135.535.000,-
7.	Alat kedokteran umum	2.033.500,-	2.033.500,-
8.	Komputer	1.103.820.000,-	1.108.896.000,-
9.	Gedung dan Bangunan	414.975.000,-	414.975.000,-
10.	Jaringan	54.409.000,-	54.409.000,-
11.	Bahan Perpustakaan	66.500,-	66.500,-
12.	Aset lainnya (asset tak berwujud)	48.950.000,-	48.950.000,-
13.	Aset lain-lain	263.203.000,-	263.203.000,-
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>3.777.553.173,-</b>	<b>3.759.603.173,-</b>

Mutasi aset tetap dalam tahun anggaran 2021 sebesar (-) Rp17.950.000,00

(Rp3.759.603.173,00 – Rp3.777.553.173,00) atau sebesar (-)0,48 % dibanding saldo per tanggal 31 Desember 2021, dengan penjelasan sebagai berikut:

Ikhtisar Mutasi selama tahun 2021.

Aset Tetap		Saldo TH. 2020 Rp.	Penambahan Rp.	Saldo TH. 2021
1.	Tanah	0,-	0,-	0,-
2.	Alat Besar	17.773.000,-	0,-	17.773.000,-
3.	Alat Angkut	986.320.773,-	(23.026.000)	963.294.773,-
4.	Peralatan Pertanian	290.000,-	0,-	290.000,-
5.	Alat Kantor dan Alat rumah Tangga	750.177.400,-	0,-	750.177.400,-
6.	Alat Studio,Komunikasi, Pemancar	135.535.000,-	0,-	135.535.000,-
7.	Alat Kedokteran Umum	2.033.500,-	0,-	2.033.500,-
8.	Komputer	1.103.820.000,-	5.076.000,-	1.108.896.000,-
9.	Gedung dan Bangunan	414.975.000,-	0,-	414.975.000,-
10.	Jaringan	54.409.000,-	0,-	54.409.000,-
11.	Bahan Perpustakaan	66.500,-	0,-	66.500,-
12.	Aset lainnya (asset tak berwujud)	48.950.000,-	0,-	48.950.000,-
13.	Aset lain-lain	263.203.000,-	0,-	263.203.000,-
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>3.777.553.173,-</b>	<b>(17.950.000)</b>	<b>3.759.603.173,-</b>

Saldo akhir aset tetap Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.759.603.173,00 yang disajikan di Neraca merupakan hasil mutasi dari Belanja Modal tahun 2003 (Neraca Awal) sampai dengan Tahun Anggaran 2021 (tahun berjalan). sehingga atas penyajian saldo aset tetap tersebut hanya berdasarkan mutasi penambahan dan pengurangan dari realisasi belanja Modal yang dilaksanakan SKPD. Saldo masing-masing kelompok aset tetap per 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tanah

----- Nihil --

b. Alat Besar

Nilai aset sebesar Rp17.773.000,00 merupakan nilai aset tahun 2020 berupa 1 (satu) buah Portabel Generating Set.

c. Alat Angkutan Darat Bermotor

Meliputi alat-alat angkutan berupa kendaraan angkutan darat, senilai Rp963.294.773,00 merupakan nilai aset tetap tahun 2020 yang terdiri dari :

- Nilai aset tahun 2020 senilai Rp986.320.773,00
- Penghapusan aset sepeda motor (3 buah) Rp 23.026.000,00 (-)

Aset tetap alat angkut darat bermotor tersebut terdiri dari:

- Kendaraan Dinas Roda Dua sejumlah 14 unit
- Kendaraan Dinas Roda Empat Sejumlah 5 unit



- d. **Peralatan Pertanian**  
Nilai aset sebesar Rp290.000,00 merupakan nilai aset tahun 2020 berupa aset tetap tang pemasang/kar tang.
- e. **Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga**  
Meliputi alat kantor dan alat rumah tangga berupa lemari, brankas, filing cabinet, meja kerja, kursi kerja dan lain lain, dengan nilai sejumlah Rp750.177.400,00 merupakan nilai aset tetap tahun 2020
- f. **Alat Studio, Komunikasi, Pemancar**  
Meliputi Camera digital, UPS, Mesin cetak ID Card, AKG wirales mikrophon, dll. Senilai Rp135.535.000,00 merupakan nilai aset tetap tahun 2020.
- g. **Alat Kedokteran Umum**  
Nilai aset tahun 2021 sebesar Rp2.033.500,00 merupakan mutasi aset dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2020 berupa 1 buah alat Clinical Termometer senilai Rp2.033.500,00
- h. **Komputer**  
Meliputi alat kantor berupa computer, laptop, note book, printer, dll dengan nilai Rp1.108.896.000,00 , terdiri dari :
- Nilai aset tahun 2020 senilai Rp1.103.820.000,00
  - Pengadaan Tahun 2021 berupa 1 buah scanner Rp 5.076.000,00
- i. **Bangunan Gedung Tempat Kerja**  
Gedung kantor BKPSDM terdiri dari 2 (dua) lantai beralamat di jalan Jendral A.Yani No. 32 E senilai Rp414.975.000,00
- j. **Jaringan**  
Meliputi jaringan listrik dan jaringan telepon dengan nilai aset sebesar Rp54.409.000,00 merupakan nilai aset tetap Tahun 2020
- k. **Bahan Perpustakaan**  
Meliputi buku perpustakaan senilai Rp. 66.500,00 merupakan nilai aset tetap tahun 2020.
- l. **Aset Lainnya**  
Merupakan aset lainnya berupa Jaringan Aplikasi pengembangan aplikasi kepegawaian senilai Rp48.950.000,00 merupakan aset tetap pengadaan tahun 2020.
- m. **Aset lain-lain**  
Meliputi aset tidak berujud berupa aplikasi SIMPEG dan aset rusak senilai Rp263.203.000,00 merupakan aset tetap tahun 2020

Aset Lain-lain terdiri dari:

- |                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| a. Aset tak berwujud berupa software SIMPEG | Rp185.350.000,00 |
| b. Aset rusak                               | Rp 77.853.000,00 |

**KETERANGAN LAIN:**

1. Nilai aset tetap tahun 2021 senilai Rp3.759.603.173,00 merupakan akumulasi nilai aset tetap sampai dengan tahun 2021, yang belum dikurangi dengan penyusutan, sehingga nilai aset tetap Tahun 2021 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp3.475.468.976,57 menjadi: Rp284.134.196,43
2. Nilai aset tetap tahun 2021 sebagaimana angka 1 sudah dilakukan rekonsiliasi dengan BPKPAD (Bidang Aset).
3. Sisa UYHD Tahun Anggaran 2021 telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp67.183.407,00 merupakan sisa UP/GU dan TU, dengan rincian:
  - a. Sisa UYHD Ganti Uang : Rp24.662.711,00
  - b. Sisa UYHD Tambah Uang : Rp42.520.696,00

**3.1.2. KEWAJIBAN**

**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

Pada Tahun 2021 SKPD masih mempunyai Kewajiban Jangka Pendek berupa utang belanja sebesar Rp133.171.079,00 terdiri dari:

1. Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Bulan Desember 2021 sebesar	Rp114.276.000,00
-----------------------------	------------------

2. Utang Belanja Jasa Kantor sebesar Rp18.895.079,00 terdiri dari:

- |                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a. Rekening Listrik bulan Desember                                           | Rp 1.529.692,00 |
| b. Rekening Telepon bulan Desember                                           | Rp 48.089,00    |
| c. Rekening /sewa internet bl.Desember                                       | Rp 924.448,00   |
| d. Rekening Air/PDAM bl. Desember                                            | Rp 392.850,00   |
| e. Upah tenaga SS bulan Desember 2021<br>(Tenaga kebersihan, Driver, Satpam) | Rp16.000.000,00 |

-----Rp18.895.079,00

**3.1.3. Ekuitas Dana**

Ekuitas akhir Tahun Anggaran 2021 merupakan penjumlahan dari ekuitas awal (ekuitas akhir T.A. 2020) dengan hasil penjumlahan surplus/defisit LO dan ekuitas yang dikonsolidasikan. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas awal merupakan ekuitas akhir tahun 2020 sebesar Rp 362.082.308,29



2. Surplus/defisit LO Rp7.948.087.842,86 (-)
- a. Beban Pegawai Rp3.831.937.181,00
- b. Beban Barang dan Jasa Rp3.908.751.244,00
- c. Beban Penyusutan dan amortisasi Rp 207.399.417,86
3. Koreksi kesalahan, Perubahan Kebijakan akuntansi Rp 0,00
4. Ekuitas untuk dikonsolidasikan: Rp7.752.972.202,00
- a. SP2D T.A. 2021 : Rp7.820.155.609,00
- b. CP (setor ke Kasda) : Rp 67.183.407,00(-)
5. Ekuitas akhir Rp7.919.938.869,43

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD

URAIAN	PAGU	LRA	LO	UTANG BELANJA
Pendapatan	-	-		
Belanja Operasi	<b>8.255.279.761,00</b>	<b>7.747.347.802,00</b>	<b>7.740.688.425,00</b>	<b>133.171.079,00</b>
Belanja Pegawai	3.925.436.376,00	3.846.028.086,00	3.831.937.181,00	114.276.000,00
Belanja Barang Jasa	4.329.843.385,00	3.901.319.716,00	3.908.751.244,00	18.895.079,00
Belanja Modal	<b>5.772.200,00</b>	<b>5.624.400,00</b>	<b>548.400,00</b>	

Belanja Modal alat rumah tangga lainnya sebesar Rp 548.400,00 tidak menjadi asset, tetapi menambah beban persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya.

## **BAB IV**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD**

#### **A. DOMISILI DAN BENTUK HUKUM ENTITAS**

Entitas pelaporan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung yang berdomisili di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 E Temanggung

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

Adapun Tugas dan fungsi BKPSDM Temanggung didasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Temanggung, yang mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang di bidang kepegawian, pendidikan dan pelatihan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi entitas, pelayanan utama entitas BKPSDM adalah mengelola sumberdaya Aparatur Sipil Negara/PNS.

Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Temanggung sampai dengan akhir Tahun 2021 berjumlah 6.135 orang, terdiri dari :

1. PNS sejumlah 5.910 orang dengan rincian sebagai berikut :
  - Pejabat Struktural : 626 orang
  - Pejabat Fungsional Tertentu : 3.922 orang, ttd:



Fungsional Guru dan Nakes : 3.635 orang

Fungsional selain Guru+Nakes: 287 orang

- Fungsional Umum/Pelaksana : 1.362 orang

2. PPPK sejumlah 225 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Tenaga Kesehatan : 10 orang

- Tenaga Penyuluh Pertanian : 61 orang, dan

- Tenaga Pendidik/guru : 154 orang

Disamping ASN tersebut diatas, terdapat pegawai Tidak Tetap (PTT) sejumlah 20 orang.

## BAB V PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) perlu didukung transparansi, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, efektifitas serta profesionalisme dalam pengelolaan anggaran, sehingga implementasinya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh sikap mental, kedisiplinan dan profesionalisme para aparatur Pemerintah. Namun demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan pasti terdapat beberapa kekurangan. Hal ini disebabkan oleh antara lain keterbatasan aparatur dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, 24 Februari 2021

KEPALA BKPSDM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang



**Drs. UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19660608 199603 2 004